

EVOLUSI KONGLOMERASI DI JEPANG: TRANSISI DARI ZAIBATSU KE KEIRETSU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI PASCA-PERANG DUNIA II

Muhammad Badar Anugrah Illahi¹, Imam Mahdi²

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²mahdi@umy.ac.id

Abstract

This study examines the economic transition in Japan from Zaibatsu to Keiretsu post-World War II and its impact on economic policies. Although Zaibatsu was dissolved by the American occupation, the conglomerate structure persisted in the form of Keiretsu, linking companies through cross-shareholding with banks at the core. This research uses a qualitative approach to explore the implications of this transition on Japan's economic policies, based on the International Political Economy (IPE) and Neoliberalism theories. Keiretsu plays a crucial role in maintaining Japan's economic stability, though challenges such as reduced market competition and entrenched management remain. The study concludes that Keiretsu remains relevant despite the pressures of globalization.

Keywords: *Zaibatsu, Keiretsu, Japanese Economy, Neoliberalism, Post-World War II, Economic Transition*

PENDAHULUAN

Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Timur, yang terdiri dari empat pulau utama Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku serta lebih dari 6.800 pulau kecil lainnya yang ber-ibu kotakan Tokyo. Negara ini dikenal karena teknologi canggihnya, budaya yang unik, serta statusnya sebagai salah satu negara ekonomi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan China, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal sekitar \$4,9 triliun pada 2024. Meskipun pertumbuhannya lambat dalam beberapa tahun terakhir, Jepang tetap menjadi pemain utama dalam ekonomi global, berkat inovasi teknologi dan sektor manufakturnya yang kuat (Boers, 2020).

Jepang merupakan rumah bagi beberapa perusahaan otomotif terbesar di dunia, termasuk Toyota, Honda, dan Nissan. Negara ini terkenal dengan kendaraan berkualitas tinggi dan inovasi dalam teknologi mobil listrik dan otonom (Ayuso-D, Iaz, & Tena-Junguito, 2020). Perusahaan Jepang seperti

Sony, Panasonic, dan Sharp adalah pemimpin global dalam sektor elektronik. Jepang juga merupakan pelopor dalam bidang robotika dan otomatisasi industri, dengan perusahaan-perusahaan seperti Fanuc dan Yaskawa yang mendominasi pasar global.

Jepang juga sebagai pusat keuangan global dengan Tokyo sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di dunia. *Bank of Japan* (BOJ) memainkan peran penting dalam kebijakan moneter, dan *Tokyo Stock Exchange* (TSE) adalah bursa saham terbesar ketiga di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Meskipun menghadapi utang publik yang sangat tinggi sekitar 234% dari PDB pada 2024 Jepang tetap memiliki ekonomi yang stabil berkat tabungan domestik yang tinggi dan kepercayaan investor internasional (Hayes, 2025). Melihat kondisi ekonomi Jepang menjadi pemain kunci dalam ekonomi global dan terus berusaha mengatasi tantangan-tantangan baru melalui teknologi dan kebijakan ekonomi yang progresif.

Namun, Jepang memiliki sejarah yang panjang dan kaya, serta telah mengalami perubahan besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini dikenal tidak hanya karena teknologi canggihnya, tetapi juga karena ketahanan ekonomi dan adaptasinya pasca Perang Dunia II. Jepang mengalami transformasi dramatis baik dari segi politik, sosial, maupun ekonomi. Setelah kalah dalam perang, Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dari tahun 1945 hingga 1952. Selama periode ini, Jepang mengalami perubahan besar yang membentuk jalur menuju pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasionalnya (Boers, 2020).

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Amerika adalah pembubaran *Zaibatsu* (konglomerat besar yang menguasai sebagian besar ekonomi Jepang) untuk mengurangi kekuatan industri dan mencegah munculnya militerisme. Namun, dalam beberapa tahun, muncul kembali kelompok perusahaan besar yang dikenal sebagai *Keiretsu*.

Tulisan ini menjadikan teori ekonomi politik internasional (IPE) dan neoliberalisme sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis transisi

ekonomi Jepang dari Zaibatsu ke Keiretsu dan dampaknya terhadap kebijakan ekonomi pasca-Perang Dunia II. Kedua teori ini akan digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ekonomi Jepang berkembang, beradaptasi, dan berinteraksi dengan sistem ekonomi global serta peran negara dalam membentuk kebijakan ekonomi domestik.

Kajian Literatur

Kajian mengenai relasi ekonomi dengan kekuatan politik sudah dibahas oleh Al Badawi (2020) dalam "*The Birth of the Zaibatsu: Meiji Industrial Modernization*" menunjukkan bahwa Zaibatsu muncul sebagai entitas yang berperan dalam modernisasi industri Jepang selama era *Meiji* (Al Badawi Habib, 2020). Keberadaan mereka menjadi bagian integral dalam transformasi ekonomi Jepang, yang membawa negara ini dari sistem feodal menuju ekonomi industrial yang terhubung dengan ekonomi global. Zaibatsu juga memainkan peran utama dalam kebijakan imperialisme Jepang, yang berujung pada keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, salah satu langkah besar yang diambil oleh pemerintah pendudukan Amerika Serikat (AS) adalah pembubaran Zaibatsu. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan terbuka. Namun, meskipun ada upaya untuk membubarkan Zaibatsu, struktur ekonomi Jepang tidak sepenuhnya berubah.

Menurut Ramaioli (2021) dalam "*A Form of Private Socialism? MacArthur and the Economic Governance of the Zaibatsu System*", meskipun SCAP (*Supreme Commander for the Allied Powers*) berusaha menghapuskan Zaibatsu sebagai bagian dari kebijakan demokratisasi, pengaruh Zaibatsu tetap terlihat (Ramaioli, 2021). MacArthur memandang mereka sebagai bentuk "*Private Socialism*" karena meskipun mereka bersifat kapitalis, mereka menciptakan stabilitas ekonomi yang membantu menghindari ketegangan sosial yang lebih besar di Jepang pasca-perang. Namun, pembubaran

tersebut tidak sepenuhnya mengubah struktur ekonomi, yang justru bertransformasi menjadi Keiretsu.

Meskipun Zaibatsu dibubarkan, mereka digantikan oleh Keiretsu, sebuah bentuk jaringan konglomerat yang lebih terdesentralisasi namun tetap mempertahankan beberapa elemen yang serupa, seperti hubungan silang saham dan hubungan erat dengan bank-bank besar. Keiretsu memainkan peran utama dalam perekonomian Jepang pasca-perang, di mana struktur konglomerat ini terus menguasai sektor-sektor utama industri Jepang.

Penelitian oleh Frendy (2020) dalam "*The Relevance of Keiretsu Affiliation on Disclosure Quality in Contemporary Japanese Economy*" menunjukkan bahwa meskipun *Keiretsu* tidak memiliki struktur yang sama dengan Zaibatsu, jaringan perusahaan ini tetap memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi Jepang. Keiretsu beroperasi dalam kerangka pasar kapitalis, tetapi mengurangi kompetisi pasar bebas di beberapa sektor kunci, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip neoliberalisme yang mengedepankan kompetisi pasar bebas (Frendy, 2022).

Reformasi ekonomi pasca-perang tidak hanya berkaitan dengan pembubaran Zaibatsu tetapi juga dengan neoliberalisasi ekonomi yang terjadi di Jepang pada 1950-an hingga 1980-an. Sebagai bagian dari kebijakan privatisasi dan de-regulasi, pemerintah Jepang mengadopsi sejumlah prinsip neoliberal yang mendukung pasar bebas dan pengurangan pengaruh negara terhadap ekonomi. Meskipun demikian, struktur Keiretsu yang terbentuk pasca-Perang Dunia II menunjukkan adanya kompromi antara mengadopsi prinsip neoliberal dan mempertahankan kendali atas sektor-sektor strategis yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Wakui (2021) dalam "*The Legacy of Post-War Economic Reform in Japan*" menguraikan bagaimana *Keiretsu* terus beroperasi dalam sistem ekonomi yang lebih terbuka namun tetap terikat oleh struktur hubungan yang kuat antara perusahaan dan bank (Wakui Masako, 2021). Transisi dari Zaibatsu ke Keiretsu menunjukkan keseimbangan yang dicapai antara membuka

ekonomi Jepang untuk persaingan global sambil mempertahankan kontrol atas sektor industri utama.

Keiretsu tidak hanya bertahan sebagai struktur ekonomi, tetapi juga memberikan implikasi besar terhadap kebijakan ekonomi neoliberal Jepang. Di satu sisi, Keiretsu mengurangi kompetisi bebas yang menjadi ciri khas kebijakan neoliberal. Di sisi lain, mereka menyediakan stabilitas ekonomi yang membantu Jepang bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat pasca-perang.

Penelitian oleh Kobayashi (2020) dalam "*Effects of Japanese Financial Regulations and Keiretsu Style Groups on Japanese Corporate Governance*" membahas bagaimana Keiretsu tetap berfungsi sebagai pengatur tata kelola perusahaan di Jepang. Keiretsu memiliki hubungan yang erat dengan bank-bank besar, yang mempermudah akses ke pembiayaan murah, mengurangi biaya pengawasan, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk tetap kompetitif meskipun ada tekanan dari pasar global (Kobayashi 2020).

Di era globalisasi, *Keiretsu* telah menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama terkait dengan standar internasional dan kompleksitas ekonomi global. Penelitian oleh Lee & Vu (2020) dalam "*Economic Complexity, Human Capital, and Income Inequality: A Cross-Country Analysis*" menunjukkan bahwa negara-negara dengan struktur ekonomi yang lebih kompleks, seperti Jepang, dapat memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi, meskipun mereka lebih maju dalam teknologi dan industrialisasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jepang mengalami kemajuan ekonomi, Keiretsu mungkin berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip neoliberalisme yang menekankan pada pembukaan pasar (Lee & Vu, 2020).

Tulisan ini menggunakan pendekatan teori ekonomi politik. Teori ekonomi politik mengkaji relasi yang terjadi dalam sistem ekonomi dan politik. Pada faktanya fungsi pasar yang awalnya dianggap akan mampu menjadi sistem yang terbuka atau netral, akan tetapi para pengambil Keputusan atau politisi memiliki kontribusi penting dalam penentuan sistem

produksi, distribusi dan konsumsi (Gilpin, 2001; O'Brien & Williams, 2016). Dalam prakteknya, teori ekonomi digunakan untuk memahami bagaimana Keputusan ekonomi akan selalu dipengaruhi oleh dinamika politik domestic maupun global.

Sebagai kelanjutan dari relasi ekonomi politik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan neoliberalisme. Neoliberalisme sendiri merupakan sebuah teori yang menjabarkan tentang adanya keterlibatan negara yang dibatasi dalam kegiatan ekonomi. Teori muncul setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1970-an yang kemudian menghasilkan sebuah institusi global atau yang disebut sebagai bagian dari "*Washington Consensus*". Fokus utamanya adalah adanya relasi negara dalam kegiatan ekonomi (Harvey, 2005).

Dari berbagai literatur tersebut masih sedikit tulisan yang menjabarkan evolusi ekonomi Jepang dengan pendekatan teori ekonomi politik dan pendekatan neoliberalisme. Tulisan ini melihat transisi penguasa ekonomi Jepang dari Zaibatsu ke Keiretsu, serta kondisi ekonomi Jepang dalam konteks kekinian.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan historis-analitis (Creswell, 2013). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena transisi konglomerasi di Jepang dari Zaibatsu ke Keiretsu, serta menganalisis implikasi kebijakan ekonomi pasca-Perang Dunia II. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menggali data historis dan teoritis yang mendalam yang berkaitan dengan topik tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis. Tujuan utama adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis transisi struktur konglomerasi yang terjadi di Jepang setelah Perang Dunia II, serta untuk menggali dampak dari transisi tersebut terhadap kebijakan ekonomi Jepang pada masa itu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumentasi historis, literatur akademik. Dalam menganalisis, penelitian ini akan menghubungkan temuan dengan teori ekonomi politik internasional (IPE) dan neoliberalisme yang dijelaskan dalam kajian teoritis. Peneliti akan membandingkan bagaimana Keiretsu sebagai bentuk konglomerasi beroperasi dalam kerangka kebijakan neoliberal dan bagaimana kebijakan internasional memainkan peran dalam perubahan ekonomi domestik Jepang.

PEMBAHASAN

Transisi dari Zaibatsu ke Keiretsu: Proses dan Dinamika

Transisi dari Zaibatsu ke Keiretsu adalah salah satu perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan korporasi Jepang, terutama terjadi setelah Perang Dunia II. Proses ini melibatkan pembubaran paksa konglomerat pra-perang (Zaibatsu) dan evolusi hubungan bisnis menjadi bentuk pasca-perang (Keiretsu). Setelah Perang Dunia II, Jepang mengalami perubahan signifikan dalam struktur ekonomi, yang dipengaruhi oleh kebijakan pendudukan Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah penting yang diambil oleh SCAP (*Supreme Commander for the Allied Powers*) adalah upaya untuk membubarkan Zaibatsu, konglomerat besar yang mengendalikan banyak sektor ekonomi Jepang. Zaibatsu memiliki hubungan erat dengan pemerintah dan militer, yang menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi di Jepang (Ramaioli, 2021). Kebijakan pembubaran ini bertujuan untuk mendemokratisasi ekonomi Jepang dan mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikhawatirkan akan memperpanjang struktur feodal dalam ekonomi negara.

Zaibatsu adalah kelompok konglomerat keuangan dan industri besar yang mendominasi ekonomi Jepang pada periode pra-perang, dimulai sejak Restorasi Meiji. Mereka digambarkan sebagai perusahaan besar yang mengendalikan banyak anak perusahaan, dipimpin oleh keluarga sesuai dengan sistem pemerintahan semi-feodal (Ericson, 2021). Hampir sembilan puluh persen ekonomi Jepang secara virtual dikendalikan oleh sejumlah kecil keluarga, terutama dari kelompok Mitsubishi, Mitsui, Yasuda, dan Sumitomo (Ramaioli, 2021).

Zaibatsu dicirikan oleh struktur piramida dengan perusahaan induk di puncak, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan banyak perusahaan dengan modal yang relatif kecil. Misalnya, dua Zaibatsu teratas, Mitsui dan Mitsubishi, masing-masing menyumbang lebih dari 5% dari total modal saham semua perusahaan Jepang. Mereka juga mendominasi perdagangan luar negeri, dengan Mitsui menguasai sekitar 18% dari ekspor dan impor Jepang, dan Mitsubishi sekitar 10% (Wakui Masako, 2021).

Zaibatsu memiliki hubungan erat dengan institusi negara dan pemerintah. Mereka dianggap penting untuk modernisasi dan militerisasi Jepang. Mitsui dan Mitsubishi, misalnya, mensponsori partai-partai politik paling berpengaruh yang berulang kali membentuk kabinet dari awal 1900-an hingga 1940 (Ramaioli, 2021). Keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan melalui komite pemerintah memperkuat kekuatan mereka. Dalam pandangan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu (SCAP), sistem Zaibatsu ini begitu mendalam di masyarakat Jepang, bahkan berfungsi sebagai faktor stabilisasi. MacArthur bahkan menggambarannya sebagai "*Private Socialism*" yang mengejutkan mengingat Zaibatsu dianggap sebagai ekspresi kapitalisme ekstrem. Pandangan ini muncul karena monopolinya atas ekonomi nasional dan ikatan eratnya dengan lembaga negara menciptakan kebingungan dalam klasifikasinya berdasarkan standar Barat.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, *General Head Quarter* (GHQ) di bawah Jenderal Douglas MacArthur memulai reformasi ekonomi (Kobayashi 2020). SCAP melihat Zaibatsu sebagai pemicu ekspansionisme Jepang dan penyebab perang (Willard & Munro, 2021). Tujuannya adalah untuk mendatangkan demokrasi, dan mengembalikan kompetisi ekonomi.

SCAP dan *Holding Company Liquidation Committee* (HCLC) memberlakukan langkah-langkah struktural radikal pada sepuluh Zaibatsu terbesar. Mereka mentransfer saham yang dipegang oleh kantor pusat Zaibatsu ke HCLC sebelum menjualnya secara publik. Untuk memutuskan ikatan pribadi, pemerintah melarang keluarga pemilik dan pejabat

perusahaan tersebut untuk menjadi pejabat di anak perusahaan. Mitsui dan Mitsubishi dibubarkan menjadi 170 dan 120 perusahaan terpisah. Pembubaran ini juga dilakukan untuk mengatasi konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan (Wakui Masako, 2021). Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan struktur pasar yang kompetitif di Jepang dan menetapkan kebijakan dan hukum persaingan untuk pertama kalinya.

Meskipun Zaibatsu secara resmi dibubarkan, sistem Zaibatsu dan tradisinya tetap hidup dalam bentuk Keiretsu. Keiretsu muncul sebagai respons terhadap pembubaran Zaibatsu oleh AS, di mana bank-bank menciptakan kembali kelompok “Zaibatsu” mereka dan mengarahkan anggota lain untuk membentuk jaringan kompleks kepemilikan silang yang terlihat saat ini (Kobayashi, 2020).

Keiretsu adalah kelompok perusahaan yang ditandai oleh jaringan kompleks kepemilikan inter-korporasi yang berpusat pada bank. Tidak seperti Zaibatsu yang memiliki perusahaan induk sentral, Keiretsu terdiri dari entitas korporasi independen yang saling terkait melalui kepemilikan silang. Contohnya adalah grup Mitsubishi saat ini, yang mencakup lebih dari 25 entitas korporasi seperti *Mitsubishi Corp*, *Mitsubishi Heavy Industries*, MUFJ (bank), dan perusahaan asuransi (Kobayashi, 2020). Meskipun terpisah, mereka saling memiliki saham kecil satu sama lain. Bank-bank utama berperan sentral dalam Keiretsu, seringkali menjadi inti kelompok (Frendy, 2022).

Jepang mengizinkan bank komersial untuk memiliki ekuitas di perusahaan lain, berbeda dengan sistem AS, yang merupakan warisan dari Zaibatsu. Hubungan informal dan pribadi—yang hampir seperti keluarga—antara para eksekutif memperkuat ikatan Keiretsu. Misalnya, eksekutif dari berbagai perusahaan Mitsubishi dilaporkan bertemu secara teratur untuk mempererat ikatan sosial. Dalam kelompok Keiretsu, ikatan pribadi antara eksekutif perusahaan terkait telah mengarahkan mereka untuk memilih produk dari kelompok Keiretsu mereka sendiri. Loyalitas ini meluas dari pemilihan baja Mitsubishi untuk mobil hingga bir Kirin di bar. Meskipun loyalitas korporasi tidak seketat dulu, tetap kuat (Kobayashi, 2020).

Tujuan awal Keiretsu adalah sebagai pertahanan terhadap pengambilalihan hostile setelah pembubaran Zaibatsu. Jaringan kepemilikan silang yang rumit ini secara efektif melindungi manajer dari ancaman luar. Organisasi Keiretsu saling mendukung untuk meningkatkan kepercayaan pada perusahaan terafiliasi. Organisasi perbankan sangat penting karena mereka bertindak sebagai pemegang saham dan kreditor (Kobayashi 2020). Ini menekan konflik kepentingan antara kedua kelas tersebut. Perusahaan non-finansial dalam Keiretsu terkadang mendapatkan perjanjian pinjaman yang lebih menguntungkan. Karena bank bertindak sebagai kreditor dan pemegang saham, perusahaan peminjam lebih bersedia mengungkapkan informasi keuangan dan internal kepada bank, mengurangi masalah asimetris informasi. Ini memungkinkan perusahaan Keiretsu untuk pulih lebih cepat selama kemerosotan ekonomi. Sistem Keiretsu memberikan stabilitas dan kelangsungan hidup bagi perusahaan di Jepang, dan dianggap sebagai kontributor utama daya saing global industri Jepang (Kobayashi, 2020).

Manajemen yang terlalu mengakar (*Corporate Entrenchment*), sistem Keiretsu bekerja terlalu efektif sebagai pertahanan anti-pengambilalihan. Manajer perusahaan tidak pernah benar-benar di bawah ancaman eksternal dan cenderung tidak bereaksi cepat terhadap ancaman dibandingkan dengan perusahaan AS.

Bias loyalitas korporasi, loyalitas ini sering kali mencegah korporasi memilih solusi yang paling rasional atau ekonomis, lebih memilih perusahaan terkait. Ini dapat menyebabkan pilihan yang kurang optimal dibandingkan dengan alternatif yang lebih murah atau lebih baik. Ikatan Keiretsu yang kohesif juga menyebabkan *group think* yang berlebihan, kadang-kadang berujung pada skandal dan penipuan. Misalnya, dalam skandal Olympus, kohesi internal menghambat kemampuan perusahaan untuk mengevaluasi keputusan mereka sendiri (Ayuso-D, Iaz, and Tena-Junguito, 2020).

Setelah Perang Dunia II, Jepang memberlakukan Undang-Undang Anti-Monopoli *Dokusen Kinshihō* atau *Anti-Monopoly Act* (AMA) pada tahun

1947, yang bertujuan untuk memulihkan persaingan bebas di pasar. AMA mencerminkan sejarah ekonomi Jepang, termasuk kekhawatiran tentang kekuatan ekonomi gabungan dan disparitas kekuatan tawar-menawar (Ayu & Widarahesty, 2012).

AMA awalnya melarang pembentukan perusahaan induk dan mencegah perusahaan menjadi perusahaan induk, meskipun ketentuan ini telah mengalami beberapa amandemen. AMA mempertimbangkan "*general capacity to do business*" (*sōgō teki jigyō nōryoku*) dalam peninjauan merger, mencerminkan kekhawatiran bahwa kekuatan ekonomi yang berlebihan dapat menciptakan kekuatan politik dan merusak kebebasan warga negara (Hayes 2025).

Pendekatan penegakan hukum, meskipun ada undang-undang yang kuat, *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) seringkali memilih pendekatan yang lebih lunak, mengandalkan panduan administratif dan laporan untuk mendorong kepatuhan, daripada tindakan hukum yang keras. Ini sebagian karena keterbatasan sumber daya dan kebutuhan akan dukungan politik. Namun, ada tekanan, terutama dari AS, untuk penegakan AMA yang lebih ketat. Interaksi dan saling ketergantungan antara perencanaan keuangan negara dan perusahaan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang terkoordinasi dan menjamin stabilitas sistem ekonomi Jepang (Dmitry V. Pushnyakov 2023). Sejak tahun 1951, *Fiscal Investment and Loan Program* (FILP) digunakan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian (DOĞRUL And KORKUT 2022).

Keberhasilan ekonomi Jepang saat ini memiliki akar sejarah yang dalam, bukan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan, melainkan hasil dari perkembangan historis yang dimulai sejak keshogunan Tokugawa (DOĞRUL & KORKUT, 2022).

Keiretsu sebagai Kelanjutan Sejarah, SCAP gagal sepenuhnya menghilangkan cetak biru struktural *Zaibatsu* dari ekonomi Jepang (Boers 2020). Sebaliknya, pengelompokan dasar perusahaan yang menjadi ciri khas *Zaibatsu* pra-perang bertahan hingga periode pasca-perang, dengan masing-

masing perusahaan otomotif besar Jepang mempertahankan hubungan jaringan *Zaibatsu* masing-masing. *Keiretsu* yang muncul setelah pendudukan Amerika memiliki banyak fitur yang sama dengan pendahulu *Zaibatsu* mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan peran dan fungsi *Zaibatsu* dalam perjalanannya tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, tetap menjadi aktor utama perbaikan ekonomi Jepang.

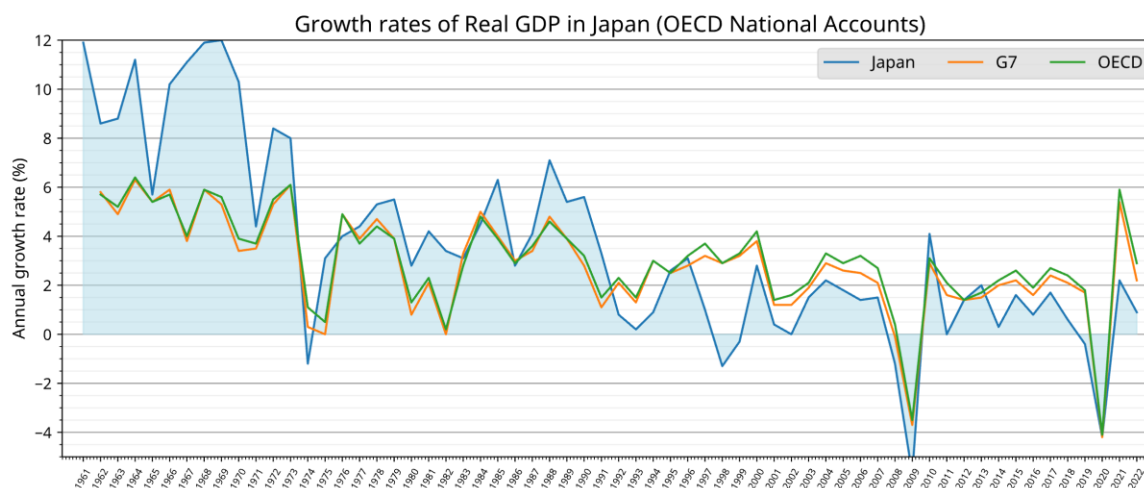
Adaptasi terhadap perubahan, meskipun menghadapi tekanan dari luar dan tantangan internal (seperti gelembung ekonomi, krisis perbankan, skandal, dan krisis keuangan 2008), kelompok *Keiretsu* tetap tangguh, menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi sambil mempertahankan inti budaya dan hubungan mereka (Kobayashi, 2020). Hal ini juga diperburuk dengan kondisi pengurangan angka kelahiran serta kurangnya efisiensi dan efektivitas investasi publik (Priangani et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi, tetapi juga mentransformasi institusi Barat ke dalam konteks budaya dan nilai-nilainya sendiri, seperti etos Konfusianisme yang menekankan hirarki dan hubungan pribadi yang erat.

Lanskap dan struktur ekonomi Jepang kontemporer

Lanskap dan struktur ekonomi Jepang modern dicirikan oleh kombinasi unik antara tradisi historis, kebijakan pascaperang, dan adaptasi terhadap tren global, yang seringkali menghasilkan sistem hibrida yang sulit diklasifikasikan berdasarkan standar Barat (Matyushok et al., 2021).

Pertumbuhan pesat Jepang setelah Perang Dunia II tidak hanya disebabkan oleh inovasi teknisnya, tetapi juga oleh interaksi kompleks faktor teknologi, ekonomi, dan sosial-politik. Sebagian besar investasi publik diarahkan pada pengembangan infrastruktur industri, dengan hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk bidang sosial. Pembangunan baru dan modernisasi kapasitas produksi berkontribusi pada pertumbuhan *Gross Domestic Product* GDP (Pushnyakov, 2023).

Gambar 1. Pertumbuhan GDP Jepang



Sumber: OECD, n.d. (<https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=350>)

Data tersebut menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Jepang yang sangat fluktuatif, namun tetap memiliki arah pertumbuhan yang jelas. Jepang yang merupakan salah satu negara terkemuka di dunia dalam struktur teknologi generasi keenam, yang dicirikan oleh pengembangan dan penggunaan wajib teknologi ilmiah tinggi, seperti bio dan nanoteknologi, rekayasa genetika, teknologi membran dan kuantum, fotonik terintegrasi, mikro mekanika, dan tenaga nuklir. Ini juga mencakup pencapaian kumulatif yang mengarah pada penciptaan komputer kuantum atau *Artificial Intelligence* (AI) (Matyushok et al., 2021).

Keunikan model keuangan Jepang terletak pada hubungan antara pembiayaan publik dan modal swasta yang signifikan dalam pelaksanaan program-program nasional. Interaksi dan interpenetrasi perencanaan keuangan negara dan korporasi berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang terkoordinasi dan menjamin stabilitas sistem ekonomi (Boers 2020).

Konsep pendekatan terintegrasi untuk regulasi sistem keuangan dipertahankan di Jepang. Struktur regulasi keuangan Jepang dipimpin oleh *Financial Services Agency* (FSA). Kementerian Keuangan (*Ministry of Finance*/MoF) dan *Bank of Japan* (BOJ) juga memainkan peran penting. BOJ bertanggung jawab atas penerbitan uang kertas dan kontrol moneter, serta

memastikan penyelesaian tanpa gangguan antar bank dan lembaga keuangan lainnya.

Perusahaan Asuransi Deposito Jepang (*Japan Deposit Insurance Corporation*) bertanggung jawab atas langkah-langkah praktis seperti penggantian deposito yang diasuransikan dan bantuan keuangan untuk lembaga keuangan. Komponen utama sistem keuangan Jepang adalah lembaga keuangan (bank dan lembaga keuangan non-bank) dan pasar keuangan (Pushnyakov, 2023).

Struktur dan ikatan kepercayaan Keiretsu dicirikan oleh jaringan kepemilikan antar-perusahaan yang kompleks yang berpusat pada bank. Kekuatan mereka terletak pada keuntungan yang diberikan kepada anggotanya, didasarkan pada hubungan kepercayaan dan saling ketergantungan. Ini mencakup dukungan timbal balik melalui kontrol timbal balik dan pertukaran transaksional melalui kepemilikan silang saham. Bank-bank dalam Keiretsu bertindak sebagai kreditor dan pemegang saham, yang mengurangi masalah asimetris informasi dan memungkinkan pembiayaan proyek yang lebih mudah.

Sistem Keiretsu melindungi manajer dari ancaman luar, meskipun ini menghalangi mentalitas "pemegang saham pertama" yang terlihat di AS. Manajer perusahaan Keiretsu memiliki insentif yang lebih tinggi untuk mengelola operasi bisnis demi keuntungan kelompok Keiretsu secara keseluruhan karena penekanan pada hubungan bisnis yang berdasarkan preferensi dan kepercayaan dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi. Namun, ini juga dapat menyebabkan manajemen yang terlalu mengakar (*entrenched management*) yang cenderung tidak bereaksi cepat terhadap ancaman eksternal. Selain hubungan korporat formal yang terikat oleh kepemilikan silang, sistem Keiretsu juga diperkuat oleh hubungan informal dan pribadi—yang hampir seperti keluarga—antara para eksekutif. Loyalitas ini begitu kuat sehingga dapat membuat kelompok Keiretsu mendukung bisnis yang lemah atau membuat keputusan finansial yang tidak menguntungkan atau irasional.

Keiretsu bertujuan untuk menjaga harga tetap rendah bagi produsen Jepang sambil memanfaatkan pasar luar negeri semaksimal mungkin, memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing asing. Mereka juga menciptakan semacam hambatan perdagangan yang independen dari intervensi pemerintah, karena perusahaan anggota Keiretsu cenderung lebih memilih untuk mempertahankan hubungan bilateral dengan perusahaan pusat daripada menjual kepada produsen asing (Boers, 2020).

Kasus Otomotif (Nissan vs. Mitsubishi) Dalam industri otomotif, merupakan salah satu faktor penentu dalam perdagangan mobil antara AS dan Jepang. Keiretsu Jepang mampu memotong biaya dan menyusun kembali investasi untuk mengalahkan persaingan asing. Contohnya adalah perbedaan nasib antara Nissan dan Mitsubishi Motors (Boers 2020). Kelemahan Fuyo Keiretsu yang mendukung Nissan memungkinkan Renault untuk mengambil kepemilikan Nissan yang lebih besar dan menerapkan reformasi yang menyakitkan, membawa Nissan kembali ke profitabilitas. Sebaliknya, *entrenchment* korporat Mitsubishi Keiretsu menyebabkan Mitsubishi Motors terpuruk lebih dalam, meskipun menerima dukungan finansial dari kelompoknya. Meskipun terjadi gerakan global menuju liberalisasi pasar, struktur Keiretsu sebagian besar tetap bertahan dan telah terbukti tangguh dalam menghadapi kondisi politik yang tidak menguntungkan (Kobayashi, 2020).

Teori Ekonomi Politik Internasional (IPE) dan Neoliberalisme

Dari perspektif IPE, kontestasi Keiretsu dapat dipahami melalui interaksi kompleks antara kekuatan pasar, negara, dan masyarakat. IPE menekankan bagaimana politik memengaruhi ekonomi dan sebaliknya, sering kali dalam konteks global.

Hubungan negara-bisnis (*Three-Way Deadlock*) dalam pembuatan kebijakan publik di Jepang sangatlah signifikan. Sistem ini sering disebut sebagai "*three-way deadlock*" atau "tiga jalan buntu" yang melibatkan birokrasi, parlemen (partai politik), dan perusahaan bisnis (sektor swasta) (Danso et al. 2021). Dalam siklus ini, lingkungan ekonomi diawasi oleh para pemimpin

perusahaan besar (termasuk Keiretsu) yang berada di bawah naungan birokrasi publik. Birokrasi mengontrol sektor swasta melalui kekuasaan untuk memberikan izin perusahaan, meregulasi kegiatan perusahaan, dan menentukan implementasi proyek yang didanai public (Ayu & Widarahesty, 2012).

Politisi tunduk pada sektor swasta karena membutuhkan dukungan keuangan untuk individu maupun partai politik. Ini menunjukkan bahwa kelompok bisnis, yang diwakili oleh Keiretsu, telah bertransformasi menjadi kelas yang sangat berpengaruh dan menjadi penentu dalam arah kebijakan Jepang. Posisi spesial yang diberikan oleh pebisnis kepada pensiunan pegawai negeri sipil, yang dikenal dengan istilah "*amakudari*" (turun dari surga), merupakan mata rantai yang terus mengalir dalam putaran aktor-aktor pengambil keputusan di Jepang, menegaskan peran penting Keiretsu dalam politik dan pemerintahan (Ayu & Widarahesty, 2012).

Neoliberalisme menganjurkan pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam ekonomi. Kontestasi Keiretsu dengan prinsip-prinsip ini menunjukkan resistensi sekaligus adaptasi selektif. AMA melarang konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan, termasuk lembaga keuangan yang memegang lebih dari 5% saham di perusahaan lain (10% untuk perusahaan asuransi) (Wakui Masako, 2021). Namun, Komisi Perdagangan Adil Jepang (JFTC) yang bertugas menegakkan AMA, cenderung menggunakan pendekatan lunak berbasis pedoman administratif daripada penegakan hukum yang lebih keras. Hal ini menunjukkan adanya hambatan kelembagaan terhadap liberalisasi ekonomi penuh (Frendy 2022).

Studi menunjukkan bahwa struktur Keiretsu sebagian besar tetap bertahan di tengah gerakan global menuju liberalisasi pasar. Dalam hal struktur modal, karakteristik unik perusahaan Jepang (seperti Keiretsu, struktur kepemilikan, dan ikatan bisnis yang erat) tidak memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan pembiayaan perusahaan yang diteliti (Kobayashi, 2020). Penemuan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada asumsi Keiretsu akan melindungi perusahaan dari tekanan pasar, faktor-faktor penentu struktur modal yang berlaku di ekonomi berbasis pasar

(seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, tangibilitas aset) juga relevan di Jepang. Hal ini menandakan bahwa Keiretsu tidak sepenuhnya mengisolasi perusahaan dari dinamika pasar (Danso et al., 2021).

Dari sudut pandang IPE, Keiretsu adalah aktor sentral yang membentuk dan dibentuk oleh negara dan lingkungan global, menunjukkan perpaduan kapitalisme nasionalis yang kuat dengan jaringan internal yang kohesif (Ramaioli, 2021). Sementara itu, dari sudut pandang Neoliberalisme, Keiretsu menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam mempertahankan struktur mereka meskipun ada tekanan dari reformasi pasca-perang dan dorongan global menuju liberalisasi pasar. Namun, mereka juga menunjukkan kemampuan untuk secara selektif mengadopsi elemen neoliberal (seperti deregulasi tenaga kerja) ketika hal itu melayani kepentingan ekonomi mereka, yang mencerminkan pendekatan pragmatis Jepang terhadap reformasi ekonomi (Niki Izumi, 2020).

KESIMPULAN

Transisi dari sistem Zaibatsu ke Keiretsu di Jepang pasca-Perang Dunia II menggambarkan perubahan struktural yang signifikan dalam perekonomian Jepang. Meskipun SCAP berhasil membubarkan Zaibatsu, struktur korporasi yang sebelumnya menguasai ekonomi Jepang tetap bertahan dalam bentuk Keiretsu. Perubahan ini bukan hanya berkaitan dengan pembubaran konglomerat besar, tetapi juga melibatkan transformasi dalam hubungan antar perusahaan dan bank, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi pasca-perang.

Keiretsu, meskipun tidak sepenuhnya sama dengan Zaibatsu, masih mempertahankan beberapa elemen penting, seperti hubungan kepemilikan silang dan ikatan kuat antara perusahaan dan bank. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jepang berusaha mengadopsi prinsip-prinsip neoliberalisme, struktur Keiretsu tetap berfungsi sebagai pengatur stabilitas ekonomi domestik. Namun, keberadaan Keiretsu juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti penghindaran terhadap persaingan pasar bebas,

manajemen yang terlalu mengakar, dan masalah dengan “*zombie firms*” yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif teori ekonomi politik internasional (IPE), Keiretsu berfungsi sebagai aktor sentral yang membentuk dan dibentuk oleh negara dan lingkungan global. Meskipun ada dorongan untuk meliberalisasi ekonomi, struktur Keiretsu tetap bertahan karena kemampuannya beradaptasi dengan kebijakan ekonomi internasional dan menjaga kestabilan ekonomi domestik. Di sisi lain, dari sudut pandang Neoliberalisme, Keiretsu menunjukkan ketahanan luar biasa dalam mempertahankan kekuatan internal mereka meskipun menghadapi tantangan dari pasar global.

Transisi dari Zaibatsu ke Keiretsu menandai pencapaian kompromi antara pasar bebas yang diinginkan oleh neoliberalisme dan kebutuhan Jepang untuk mempertahankan kontrol atas sektor-sektor strategis. Keiretsu menjadi simbol dari adaptasi Jepang terhadap globalisasi, sekaligus mempertahankan unsur-unsur struktural yang sudah ada dalam ekonomi negara tersebut. Di masa yang akan datang tantangan bagi Jepang adalah bagaimana menjaga keberlanjutan sistem Keiretsu dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Rindu, and Yusy Widarahesty. (2012). “Perkembangan Peran Dan Fungsi Zaibatsu (Kongsi Dagang) Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Jepang Sebelum PD II Sampai Pasca PD II.” Vol. 1.
- Ayuso-D, Alejandro, Iaz, and Antonio Tena-Junguito. (2020). “Trade in the Shadow of Power: Japanese Industrial Exports in the Interwar Years †.” *Economic History Review*.
- Badawi Habib, Al. (2020). “Birth of the Zaibatsu: Meiji Industrial Modernization.”
- Boers, Jasper. (2020). “The Keiretsu Advantage: How Japanese Automakers Thwarted Competition.” *SOCIAL SCIENCES | Economic History and International Relations*. Vol. 1.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Danso, Albert, Samuel Fosu, Samuel Owusu-Agyei, Collins G. Ntim, and Emmanuel Adegbite. (2021). “Capital Structure Revisited. Do Crisis and Competition Matter in a Keiretsu Corporate Structure?” *International*

Journal of Finance and Economics 26 (4): 5073–92.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2055>.

Dmitry V. Pushnyakov. (2023). “Analysis of the Financial System of Japan.” *European Scientific E-Journal*. <https://doi.org/10.47451/tss2022-11-04>.

DOĞRUL, Mürsel, and Cem KORKUT. (2022). “Transformation of the Institutional Political Economy of Japan: From Rice Field Property Reform to the Zaibatsu.” *Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review)*, November. <https://doi.org/10.21121/eab.1087133>.

Ericson, Steven. (2021). “The Wealth of Zaibatsu Owner Families: The Impact of Zaibatsu Busting in Occupied Japan.” *Shashi: The Journal of Japanese Business and Company History* 6 (1). <https://doi.org/10.5195/shashi.2021.48>.

Frendy. (2022). “The Relevance of Keiretsu Affiliation on Disclosure Quality in Contemporary Japanese Economy.” *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics* 29 (6): 1579–99. <https://doi.org/10.1080/16081625.2020.1726191>.

Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press.

Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.

Hayes, Gregory. (2025). “The Failings of Post-War Japanese Antitrust Reforms.” *Northwestern Journal of International Law & Business*. Vol. 45. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb>.

Kobayashi, Ken. (2020). “Effects of Japanese Financial Regulations and Keiretsu Style Effects of Japanese Financial Regulations and Keiretsu Style Groups on Japanese Corporate Governance Groups on Japanese Corporate Governance Effects of Japanese Financial Regulations and Keiretsu Style Groups on Japanese Corporate Governance.” *UC Law SF International Law Review*. Vol. 43. https://repository.uclawsf.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol43/iss2/7.

Lee, Kang Kook, and Trung V. Vu. (2020). “Economic Complexity, Human Capital and Income Inequality: A Cross-Country Analysis.” *Japanese Economic Review* 71 (4): 695–718. <https://doi.org/10.1007/s42973-019-00026-7>.

Matyushok, Vladimir, Vera Krasavina, Andrey Berezin, and Javier Sendra García. (2021). “The Global Economy in Technological Transformation Conditions: A Review of Modern Trends.” *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja* 34 (1): 1471–97. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844030>.

Niki Izumi. (2020). “Policymaking Process for Foreign Care Workers in Contemporary Japan: Changes and Continuation.”

- O'Brien, R., & Williams, M. (2016). *Global Political Economy: Evolution and Dynamics* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- Priangani, A. (2021). YOSHIHIDE SUGA POLICY TO CONTINUE ABENOMICS IN EAST AND SOUTHEAST ASIA. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(01), 1-19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.389>
- Ramaioli, Federico Lorenzo. (2021). "A Form of Private Socialism? MacArthur and the Economic Governance of the Zaibatsu System."
- Tyers, Rod. (2011). "CENTRE FOR APPLIED MACROECONOMIC ANALYSIS CAMA Working Paper Series Japanese Economic Stagnation: Causes and Global Implications* Japanese Economic Stagnation: Causes and Global Implications."
<http://ssrn.com/abstract=1876183><http://cama.anu.edu.au/Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=1876183><https://ssrn.com/abstract=1876183><http://ssrn.com/abstract=1876183><https://ssrn.com/abstract=1876183>
- Wakui Masako. (2021). "Zaibatsu Break-Ups The Legacy of Post-War Economic Reform in Japan and Digital Economies."
https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_
- Willard, Tracey, and Kate Munro. (2021). *Library Policy*.
www.royalsocietypublishing.org/journal/rsos